



PUTUSAN
Nomor 245 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Tarsisius Didik Taryadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.KI.06.07.02, tanggal 09 November 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

YANGCENT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Taman Kota Blok E-3/2, RT.012/RW.005, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Dr. Eddie Kusuma, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Eddie Kusuma & Associates, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor J.066/AGB/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 245 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat atas Objek Gugatan;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor: HKI-KI.06.07-10 tanggal 6 Oktober 2020, Hal: Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri (Objek Gugatan), sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan lain yang mencabutnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Gugatan berupa Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor: HKI-KI.06.07-10 tanggal 6 Oktober 2020, Hal: Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor: HKI-KI.06.07-10 tanggal 6 Oktober 2020, Hal: Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 197/G/2020/PTUN.JKT., tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Maret 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 245 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor: 197/PEN/2020/PTUN.JKT, tanggal 22 Februari 2021 tidak sah dan tidak berlaku;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (Semula Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 197/G/2020/PTUN.JKT., tanggal 22 Februari 2021;
3. Menghukum Termohon Kasasi (Semula Penggugat) untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 5 April 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 245 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Mahkamah Agung berwenang memeriksa sengketa *a quo* di tingkat kasasi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Menteri Hukum Dan HAM berwenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;
- Bahwa keputusan objek sengketa ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah Menteri Hukum Dan HAM;
- Bahwa sebelum penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama menteri meminta rekomendasi kepada Komisi Banding Merek, sehingga surat permintaan rekomendasi tersebut juga harus dimaknai sebagai suatu pelimpahan wewenang dari menteri kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Keberadaan surat permintaan rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan adanya surat rekomendasi dari Komisi Banding Merek, menjadi dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, dinilai sebagai suatu rangkaian proses yang terpisahkan satu sama lainnya. Dengan demikian, permintaan rekomendasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 72 ayat (9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, pada pokoknya menyatakan: (1) Termohon Kasasi/Penggugat (Yangcent) adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas merek: "I am Geprek Benu Sedep Bener + Lukisan", Nomor Pendaftaran IDM000643530, Kelas 43, tanggal pendaftaran 24 Mei 2019, nama pemilik Yangcent", "Geprek Benu Sedep Bener + Lukisan", Nomor Pendaftaran IDM000643529, Kelas 43, tanggal pendaftaran 24 Mei 2019, nama pemilik Yangcent", "I am Geprek Benu Sedep Bener + Lukisan", Nomor Pendaftaran IDM000643532, Kelas 29, tanggal pendaftaran 24 Mei

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 245 K/TUN/2021



2019, nama pemilik Yangcent"; (2) Menyatakan permohonan merek atas nama Ruben Samuel Onsu (6 merek terdaftar) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "I am Geprek Benu Sedep Beneerrr" milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono disingkat Ayam Geprek Benu, Nomor Pendaftaran IDM000643531, Kelas 43, Tanggal penerimaan 03 Mei 2017, Tanggal pendaftaran 24 Mei 2019, nama pemilik PT. Ayam Geprek Benny Sujono; (3) Menyatakan merek-merek atas nama Ruben Samuel Onsu (6 merek terdaftar) adalah merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama Badan Hukum PT. Ayam Geprek Benny Sujono disingkat Ayam Geprek Benu; (4) Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya pendaftaran merek atas nama Ruben Samuel Onsu (6 merek terdaftar); (5) Memerintahkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis untuk melaksanakan pembatalan merek-merek atas nama Ruben Samuel Onsu tersebut di atas, yaitu dengan mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari Indonesia Daftar Merek, dengan segala akibat hukumnya (6 merek terdaftar). Dengan demikian, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa bertentangan dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 245 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 245 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)